



LEMHANNAS RI

NEWSLETTER

TIADA KEBENARAN YANG MENDUA

EDISI XII 20 JULI 2010

HASIL AUDIT BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMHANNAS RI TAHUN 2009 DAN PEMBUKAAN SARASEHAN PEMANTAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA

Pada tanggal 8 Juni 2010, Gubernur Lemhannas RI Prof. DR. Muladi, S.H. menerima penyerahan hasil audit BPK-RI atas laporan keuangan Lemhannas tahun anggaran 2009 yang dilanjutkan dengan acara sarasehan bertempat di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.

Berdasarkan hasil audit BPK RI, Lemhannas RI mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2009. Hal ini mengulang prestasi sebelumnya untuk laporan keuangan tahun anggaran 2007 dan 2008 yang juga mendapatkan predikat WTP. Hasil evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lemhannas RI tahun 2009 oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lakip Lemhannas RI memperoleh penilaian dengan peringkat ke-15 dari 74 institusi yang dinilai dari aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerjanya. Prestasi ini membuktikan bahwa pengelolaan anggaran Lemhannas RI telah memiliki tingkat kepatuhan yang baik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penerapan sistem pengendalian intern telah berjalan secara efektif, efisien dan produktif. Pengelolaan anggaran dan keuangan tidak terdapat unsur manipulatif dan salah saji yang material. Pencatatan dan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta kecukupan bukti dalam pengungkapan data.

Setelah acara penyerahan hasil audit BPK-RI, acara dilanjutkan dengan sarasehan yang dihadiri oleh para pejabat dan segenap warga Lemhannas RI dengan tema "**Pemantapan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja dalam Rangka Reformasi Birokrasi Lemhannas RI**". Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI antara lain mengatakan bahwa keberhasilan Lemhannas RI dalam pengelolaan program dan anggaran yang diwujudkan dalam akuntabilitas laporan keuangan dan LAKIP adalah merupakan hasil kerja keras seluruh warga Lemhannas RI dan juga tidak lepas dari pembinaan serta arahan dari instansi terkait seperti BPK, BPKP dan lainnya melalui berbagai forum berupa sarasehan, lokakarya, pemeriksaan, bimbingan, dan koordinasi serta konsultasi.

Dengan melakukan reformasi birokrasi, akuntabilitas keuangan dan kinerja Lemhannas RI terus makin meningkat, sehingga eksistensi Lemhannas RI sebagai lembaga unggulan semakin terwujud.

Dalam proses reformasi birokrasi tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah bentuk partisipasi sebagai sumber kekuatan dan pendorong terwujudnya kerjasama untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan terbaik, karena efektivitas dan keberhasilan reformasi birokrasi akan sangat

tergantung pada kepedulian dan partisipasi dari seluruh anggota Lemhannas RI.

Untuk itu Gubernur menghimbau agar warga Lemhannas RI menjadikan hasrat partisipasi menjadi titik sentral pola pikir dan budaya dalam penyelenggaraan kehidupan keseharian baik dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.



Penyerahan hasil audit BPK RI oleh Ketua BPK RI kepada Gubernur Lemhannas RI, dimana Lemhannas RI meraih kembali predikat WTP untuk yang ketiga kalinya berturut-turut

DAFTAR ISI

1. Hasil Audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Lemhannas RI Tahun 2009 dan Pembukaan Sarasehan Pemantapan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja....	1
2. Seminar Nasional Ikatan Alumni Lemhannas RI (IKAL).....	2
3. Kesiapan Proyek PHLN Lemhannas RI dan Penandatanganan Amandemen Kontrak.....	3
4. Kunjungan Delegasi Masyarakat Sipil (Civil Society) Myanmar ke Lemhannas RI.....	4
5. Kunjungan Delegasi dari The Australian Defence College-Centre for Defence and Strategic Studies.....	5
6. Akselerasi Proses Pendidikan Politik di Indonesia.....	6
7. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, konsepsi nasional, dan Kepemimpinan bagi Pejabat Pemerintahan Daerah, Pimpinan, dan DPRD Angkatan XXIV Tahun 2010.....	7
8. Courtesy Call Athan AS Lama dan Perkenalan Athan Baru kepada Gubernur Lemhannas RI.....	8
9. Kunjungan Gubernur Lemhannas RI ke Inggris dalam rangka SSLN PPARA XLIV tanggal 23 s/d 28 Juni 2010.....	9
10. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Kalangan Pemuda Angkatan II Tahun 2010.....	10
11. Peresmian Revitalisasi Fitness Centre di Lemhannas RI.....	11
12. Peringatan Isra' dan Mi'raj di Lemhannas RI.....	12

SEMINAR NASIONAL IKATAN ALUMNI LEMHANNAS RI (IKAL)

Sebagai salah satu wujud kepedulian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Ikatan Alumni Lemhannas RI (IKAL) menyelenggarakan Seminar Nasional bertema **“Mencari Format Sistem Keamanan Nasional dalam Era Demokrasi dan Globalisasi”** pada tanggal 22-23 Juni 2010 di Gedung Dwiwarna. Acara yang berlangsung selama 2 (dua) hari ini dibuka oleh Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, dengan mengundang pembicara seperti Menko Polkam, Menko Perekonomian, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Lemhannas, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Ketua MPR RI, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Wakil Ketua DPD RI, para Politisi dan Akademisi.

Seminar Ikatan Alumni Lemhannas RI ini menjadi forum yang sangat penting dan strategis, serta merupakan mimbar akademis dengan semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang heterogen, karena melibatkan unsur-unsur akademisi, praktisi, pejabat birokrasi secara luas, dan elemen masyarakat lainnya yang menunjukkan wujud kepedulian terhadap masa depan bangsa Indonesia yang memang menjadi tanggung jawab bersama.

Seminar ini mengangkat 4 (empat) topik yaitu: **pertama**, Konsensus Politik dan Prinsip Filosofi Sistem Pertahanan dan Keamanan dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945; **kedua**, Perspektif Sistem Keamanan Nasional dalam Rangka Kepentingan Nasional; **ketiga**, Sistem

Keamanan Nasional dalam Perspektif Seluruh Sendi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; dan **keempat**, Sistem Keamanan Nasional dalam Pergaulan Internasional dan Perspektif Operasional.

Konsep dasar keamanan nasional berpijak pada kedaulatan dan nilai dasar Indonesia, yaitu cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Indonesia perlu menjaga dan memantapkan legitimasi negara, memiliki dan menjaga identitas, serta membangun kemampuan daya saing bangsa untuk *survive* sepanjang hayat. Selaku Pembina IKAL, Gubernur Lemhannas RI menyatakan bahwa, pendekatan keamanan nasional harus memperhitungkan dimensi geopolitik dan geostrategi dan posisi kunci dalam komunitas regional Asia Pasifik. Dan tentu saja dengan asumsi yang cukup dipahami seperti tingkat perkembangan ancaman yang semakin maju.

Dalam kerangka pendekatan pencarian format sistem keamanan nasional, harus diakui bahwa Indonesia membutuhkan sebuah proses *socio-engineering* bersama masyarakat dalam menjaga, mengutamakan, dan mendorong kepentingan nasional sebagai pertimbangan utama bagi setiap langkah membangun negeri ini, dan adanya payung hukum peraturan perundang-undangan untuk sistem keamanan nasional dinilai sangat penting dengan fase-fase penyiapan kesepakatan tentang konsep, asumsi, dan strategi keamanan nasional.



Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono membuka Seminar Nasional IKAL di Gd. Dwiwarna Purwa Lemhannas RI

KESIAPAN PROYEK PHLN LEMHANNAS RI DAN PENANDATANGANAN AMANDEMEN KONTRAK

Selasa, 13 Juli 2010 Tim Project Hibah Luar Negeri (PLHN) Lemhannas RI menyampaikan laporan kesiapan proyek kepada Gubernur Lemhannas RI di Nusantara I Gd .Trigatra. Ir. Kurdinanto Sarah, M.Sc sebagai koordinator Tim Adhoc ICT Lemhannas RI dan selaku penanggungjawab Proyek PHLN menyampaikan bahwa dalam kerangka program kerjasama finansial Indonesia–Spanyol, Lemhannas RI dan CIMSA (Spanyol) telah menandatangani perjanjian kontrak No. 01/II/2008 tanggal 28 Februari 2008 untuk proyek “*Strengthening the capacity Building of the National Resilience Institute Of Republic Of Indonesia*”, yang terdiri dari desain, pengembangan, dan instalansi sistem informasi manajemen terintegrasi untuk Lemhannas RI. Sehubungan dengan adanya jeda waktu dari kontrak perjanjian sampai dengan waktu saat ini, telah di lakukan penyesuaian ruang lingkup proyek dalam berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan teknis saat ini di Lemhannas RI, dan juga untuk memastikan integrasi dengan infrastruktur dan sistem yang di beli atau di kembangkan oleh Lemhannas RI.

Selanjutnya Lemhannas RI bekerjasama dengan CIMSA telah melakukan survei komprehensif untuk memetakan kondisi ICT Lemhannas RI saat ini dan untuk membuat identifikasi rinci kebutuhan teknik dari infrastruktur, pengembangan sistem, pelatihan, dan sebagainya. Identifikasi tersebut diatas telah dirangkum dalam



Rapat kesiapan proyek PHLN Lemhannas RI - CIMSA di Ruang Rapat Nusantara I Gd. Trigatra

kebutuhan–kebutuhan pada *master plan* ICT Lemhannas RI, yang berfungsi sebagai *roadmap* dan petunjuk atas penyesuaian–penyesuaian pada kontrak perjanjian.

Brigjen Pol. DR. HM. Said Saile, M.Si, Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kesempatan itu melaporkan tentang status proses menuju kontrak efektif proses amandemen kontrak kepada Gubernur Lemhannas RI. Keseluruhan nilai kontrak adalah sebesar EUR 7.390.093, pembiayaannya melalui *softloan* skema “*mixed credit*” (50 % *Development Aid Fund*, dan 50% *Export Credit*).

Berkaitan dengan itu, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan beberapa arahan: **pertama**, *Transfer Of Knowledge* harus dilakukan dengan sebaik–baiknya; **kedua**, libatkan semua SDM potensial yang ada di Lemhannas RI; **Ketiga**, bantu dan dukung semua kegiatan proyek secara optimal; **Keempat**, *Sense Of Belonging* dan *Sense of Security* harus di miliki oleh semua pihak; **Kelima**, kerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan harus terjalin optimal sehingga keseluruhan proyek menjadi sukses. Sebagai tindak lanjut dari laporan kesiapan proyek PHLN tersebut, pada hari Rabu: 14 Juli 2010 pukul 13.30 WIB di lakukan acara penandatanganan Amandemen kontrak proyek PHLN Lemhannas RI bertempat di Ruang Rapat Nusantara I Gd. Trigatra yang di saksikan oleh Sektama Lemhannas RI DR. Ardi Partadinata, beserta para kepala Biro, Direktur, dan Undangan lainnya.



Penandatanganan Amandemen Kontrak Proyek PHLN antara Lemhannas RI dengan CIMSA

KUNJUNGAN DELEGASI MASYARAKAT SIPIL (CIVIL SOCIETY) MYANMAR KE LEMHANNAS RI

Kunjungan delegasi civil society dari Myanmar sebanyak 13 (tigabelas) orang yang didampingi oleh 2 (dua) orang perwakilan dari Friedrich Ebert Stiftung (FES) pada tanggal 15 Juni 2010 ke Lemhannas RI diterima di Ruang Rapat Nusantara I. Rombongan yang dipimpin oleh Mr. Khim Zaw Win bertujuan untuk Audiensi kepada Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Muladi, S.H., yang merupakan salah satu tokoh Nasional yang mengalami dan melanjutkan transisi politik di Indonesia pasca 1998 (tokoh senior di era orde baru dan reformasi).

Myanmar merupakan sebuah negara yang memulai transisinya lebih dahulu dibandingkan Indonesia, namun demokrasi di Myanmar masih sangat jauh tertinggal dari Indonesia yang telah menjadi negara paling demokratis di Asia Tenggara. Dengan latar belakang tersebut, delegasi dari masyarakat sipil Myanmar ingin mempelajari proses transisi demokrasi di Indonesia, karena sejak tahun 1998 hingga 2010 Indonesia dinilai sangat berhasil dalam melakukan proses demokratisasi maupun dalam mempertahankan negara kesatuan.

Bhurma telah diperintah oleh rezim militer sejak tahun 1962, sehingga aksi demonstrasi oleh para mahasiswa Myanmar pada tahun 1988 justru dihadapi dengan kekerasan oleh rezim yang berkuasa. Tindakan masyarakat



Suasana acara diskusi di Ruang Rapat Nusantara I, Gd. Trigatra Lemhannas RI

dunia untuk mengisolasi negara tersebut dan memberlakukan sanksi ternyata tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Namun belakangan ini, ada kecenderungan pergerakan di konstelasi politik melalui *Seven-Stage Plan*, suatu bentuk pemerintahan yang konstitusional, dengan diadopsinya konstitusi baru pada bulan Mei 2008, dan rencananya akan diadakan Pemilu Nasional pada tahun 2010.

Myanmar memiliki hubungan historis yang cukup dekat dengan Indonesia dimulai dari hubungan baik antara Presiden Soekarno dengan U Nu, Perdana Menteri pertama Burma kala itu. Selain hubungan historis tersebut, Myanmar juga memiliki banyak kesamaan politik, sosial dan budaya dengan Indonesia, karena kedua negara merupakan negara multi etnis. Di Indonesia perbedaan etnis dapat diselesaikan dengan baik karena adanya ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, namun hal ini berbeda dengan Negara Myanmar yang justru menjadi faktor *Destabilisasi*.

Di Myanmar, hubungan sipil-militer yang seimbang masih merupakan harapan belaka. Untuk itu, Duduknya kedua belah pihak di parlemen merupakan langkah awal untuk memperbaiki hubungan sipil-militer.

Dalam waktu dekat Myanmar akan melaksanakan pemilu, namun hal ini tidak dapat mengubah keadaan Myanmar dalam sesaat. Tetapi, pemilu akan menjadi langkah awal dari transisi politik Myanmar. Melalui pertemuan dengan Gubernur Lemhannas, para tamu mengeksplorasi tahapan saat terjadinya proses transisi politik di Indonesia. Karena itu, penjelasan dari Gubernur Lemhannas RI akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi



Pertukaran cinderamata antara Mr. Khim Zaw Win dari Myanmar dengan Gubernur Lemhannas RI

Myanmar.

Pada akhir acara, Gubernur Lemhannas menyampaikan kesan dan pesan kepada rombongan Myanmar bahwa selain dapat belajar dari proses transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia, masyarakat Myanmar harus bersatu-padu dalam mengawal proses transisi demokrasi yang sedang berlangsung di Myanmar, dan bekerja sama dengan kelompok *civil society* lainnya. Dalam sejarah pembentukannya, militer di Indonesia memiliki akar yang kuat di dalam masyarakat Indonesia, sehingga tidak mengalami kesulitan yang berarti untuk secara bertahap melepaskan fungsi politik maupun keterlibatan dalam bidang ekonomi. Selain penghapusan dwifungsi TNI, Kementerian Pertahanan RI juga sudah dipimpin oleh sipil.

Indonesia sendiri dalam peran diplomasi bebas aktifnya di kawasan ASEAN akan selalu membantu proses demokratisasi di Myanmar, sekaligus juga mengundang peserta dari negara Myanmar untuk mengikuti pendidikan PPR di Lemhannas RI.

Acara diakhiri pada pukul 12.00 WIB. Sebelum meninggalkan Lemhannas RI, rombongan delegasi Myanmar melakukan foto bersama dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan para pejabat Lemhannas RI lainnya.

KUNJUNGAN DELEGASI DARI THE AUSTRALIAN DEFENCE COLLEGE – CENTRE FOR DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES

Lemhannas RI menerima kunjungan delegasi *the Australian Defence College for Defence Strategic Studies* (CDSS) di Ged. Asta Gatra Lt. III Barat sebanyak 12 orang, didampingi oleh Atase Pertahanan Australia di Jakarta, pada tanggal 8 Juni 2010.

Kunjungan tersebut dimulai dengan *courtesy call* oleh 3 (tiga) orang perwakilan CDSS Australia beserta Asisten Atase Pertahanan Australia kepada Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Marsda TNI (Purn.) Surya Dharma, S.IP, dan Karo Humas. Selanjutnya, dilaksanakan acara diskusi di Ged. Asta Gatra Lt. III Barat, yang dihadiri oleh 12 (duabelas) orang peserta PPRA XLIV dan didampingi oleh Mayjen TNI (Purn.) Pandji Susilo, Ir. Timotius D. Harsono dan Karo Humas.

Kegiatan diskusi dipimpin oleh Marsda TNI (Purn.) Surya Dharma S. IP dengan topik paparan Australia berjudul ***What should the Obama Administration be Doing to Increase Efforts to Counter Terrorism***. Sementara peserta PPRA XLIV Lemhannas RI memaparkan topik ***What Indonesia Expects to the Obama***

Administration for the World in Terms of Prosperity and Security. Kegiatan diskusi dan tanya jawab berlangsung sangat antusias. Masing-masing pihak memberikan banyak pertanyaan dan pendapat yang berhubungan dengan kebijakan militer Amerika Serikat, pemerintahan Barrack Obama serta pengaruhnya terhadap Indonesia.

Bagi Indonesia yang sudah berkali-kali mengalami tindak kejahatan terorisme yang telah merenggut korban nyawa orang-orang yang tidak berdosa, terorisme merupakan perang nyata (*real war*). Karena di dunia tidak ada negara yang bebas dari ancaman terorisme, diperlukan kerjasama antar negara dalam upaya menanggulangi kejahatan terorisme tersebut.

Selain ancaman terorisme, diskusi juga menyangkut isu global yang harus dihadapi dunia, termasuk Indonesia, di masa depan antara lain meliputi perubahan iklim, kelangkaan energi, makanan dan lain-lain. Namun untuk masalah krisis pangan bagi Indonesia tidak terlalu mengkhawatirkan, karena



delegasi the Australian Defence College for Defence Strategic Studies (CDSS)

kondisi demografisnya memungkinkan Indonesia untuk menjadi salah satu *food center*. Untuk saat ini, Indonesia selain menghadapi permasalahan terorisme, juga harus segera mengatasi permasalahan kemiskinan, kerusakan, korupsi, *illegal logging*, mafia hukum dan banyak persoalan lainnya yang membutuhkan penanganan segera.

Menurut pandangan peserta diskusi dari Lemhannas RI, AS memiliki standar ganda dalam hal penerapan hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan sentimen negatif dan kemarahan terhadap negara Amerika Serikat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam suatu hubungan yang baik, AS semestinya memahami Indonesia, sebagaimana Indonesia juga memahami peran dan kepentingan AS.

Disimpulkan dari diskusi tersebut bahwa terorisme merupakan permasalahan ideologi yang dipicu oleh kesenjangan sosial, seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Karenanya permasalahan terorisme adalah permasalahan internasional yang harus diselesaikan bersama.

Acara diakhiri pukul 12.00 WIB dan ditutup dengan foto bersama oleh rombongan *Australian Defence College-Centre for Defence and Strategic Studies* dengan para pejabat Lemhannas RI dan peserta PPRA XLIV di depan Gedung Asta Gatra.



Suasana diskusi yang dilaksanakan di Gd. Asta Gatra Lt. III Barat antara Lemhannas RI dengan delegasi the Australian Defence College for Defence Strategic Studies (CDSS)

AKSELERASI PROSES PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA

Kompleksitasnya permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat memerlukan pemimpin yang memiliki kualitas prima tidak hanya kecerdasan intelektual tetapi kecerdasan sosial, emosional dan spiritual. Pada era demokrasi sekarang ini, pemimpin dihadapkan pada tuntutan perubahan segenap kehidupan yang membawa kemajuan bagi bangsa, tidak hanya mampu memberikan visi, inspirasi, dan semangat saja. Pemimpin perlu memiliki kemampuan besar untuk mengelola praktik demokrasi yang saat ini memperlihatkan fenomena politik pragmatis dan jauh dari semangat nasionalisme kebangsaan. Salah satu fenomena yang berkembang saat ini adalah setiap warga negara berhak terlibat dalam proses politik. Dampaknya luar biasa, yaitu masyarakat merasakan bebas menggunakan hak-hak politik secara maksimal khususnya kebebasan dalam menentukan pilihan dan peluang mencalonkan diri sebagai pemimpin. Konsekuensinya adalah dilema dalam proses seleksi kepemimpinan yang berkaitan dengan kapabilitas pemimpin yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan bangsa.

Berangkat dari latar belakang pemikiran tersebut diatas, Direktorat Pengkajian Politik Deputy Pengkajian Strategik Lemhannas RI, pada hari Selasa, 6 Juli 2010 menyelenggarakan *Round Table Discussion (RTD)* di Ruang Rapat Nusantara I Gd. Trigatra dengan tema "**Akselerasi Proses Pendidikan Politik Di Indonesia Untuk Penyiapan Regenerasi Kader Pimpinan Yang Profesional Dalam Rangka Mendukung Proses Pembangunan Nasional**". RTD dibuka dengan *keynote speech* dari Gubernur Lemhannas RI, yang di bacakan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb menyatakan bahwa tema ini merupakan sebuah tema besar yang memiliki makna strategis mengingat berbagai permasalahan dalam kaderisasi pimpinan yang berdampak terhadap kelangsungan proses pembangunan nasional.



Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb membuka RTD bidang politik



DR. Anas Urbaningrum salah satu pembicara dalam RTD politik yang diselenggarakan di Ruang Rapat Nusantara I Gd. Trigatra Lemhannas RI

Dengan sistem yang berjalan saat ini, bangsa Indonesia mengalami berbagai hambatan untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kondisi bangsa. Hal ini dapat dimaklumi karena belum terbangunnya format kaderisasi pemimpin yang ideal bagi sebuah bangsa yang plural seperti Indonesia. Sementara itu, Indonesia sesungguhnya memerlukan "pemimpin super" dalam arti, memenuhi kriteria ideal seorang pemimpin, ditambah kemampuan khusus mengelola kemajemukan. Dengan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah tetapi sumber daya alam yang tinggi, pemimpin tersebut memerlukan proses pengayaan karakter aspek moral dan kemampuan sehingga tanpa *indoktrinasi* sekalipun akan merujuk kepada tujuan bernegara secara berkesinambungan yang pasti masih relevan hingga 35 tahun akan datang yaitu ketika 1 (satu) abad usia kemerdekaan RI.

Round Table Discussion ini diharapkan membahas beberapa solusi yang akan di bangun bersama seperti: **pertama**, menjadikan program pendidikan politik yang bertujuan mendidik masyarakat untuk memahami dan menghayati hak dan kewajiban politik sebagai warga negara menjadi program wajib pemerintah, KPU dan partai politik; **kedua**, memberikan saran revisi terhadap undang-undang partai politik yang bertujuan mewajibkan partai politik melakukan penjaringan dan menyiapkan calon sedini mungkin melalui proses yang benar-benar demokratis, berkeadilan dan berkesetaraan; **ketiga**, meningkatkan peran serta media untuk merubah cara pandang masyarakat terhadap kepentingan sesaat khususnya biaya mengikuti proses politik yang mahal, sekaligus bisa memaksa partai-partai politik untuk tidak menjadikan partai sebagai "*kendaraan sewaan*" bertarif tinggi dalam pencalonan pejabat publik.

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Konsepsi Nasional, dan Kepemimpinan bagi Pejabat Pemerintahan Daerah, Pimpinan, dan Anggota DPRD Angkatan XXIV Tahun 2010



Wakil Gubernur Lemhannas mengalungkan tanda peserta kepada salah satu perwakilan peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Konsepsi Nasional, dan Kepemimpinan

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Konsepsi Nasional, dan Kepemimpinan adalah bagian dari konsolidasi demokrasi. Pada hakekatnya pemantapan ini adalah upaya untuk memberikan pencerahan secara dialogis dengan materi yang menjadi bahan ajaran inti Lemhannas. Gubernur Lemhannas RI, yang diwakili oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI membuka acara tersebut pada 28 Juni 2010 di Gedung Dwiwarna. Peserta Adeksi Angkatan XXIV berasal dari Pejabat Pemerintahan Daerah, Pimpinan, dan Anggota DPRD seluruh Indonesia yang berjumlah 76 (tujuh puluh enam) orang.

Berkaitan dengan dasar negara dan kualitas ketahanan nasional, Gubernur mengutip pidato Presiden RI, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 2010, "**Pancasila sudah diungkapkan 65**

tahun lalu oleh Bung Karno, sebagai pendiri negara ini, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih relevan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa hingga kini."

Konsep Pancasila sebagai dasar negara tentu saja harus melandasi setiap kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu konsep gotong royong, demokrasi dengan mufakat dan perwakilan, serta nasionalisme yang bergandengan erat dengan bangsa lain. Namun, melihat tindak kekerasan, terorisme, radikalisme, atau separatisme yang masih ada saat ini merupakan ancaman dan dapat membawa pengaruh pada kualitas ketahanan nasional Indonesia. "**Semua itu dapat menjadi ancaman dan berakumulasi sehingga harus segera dibenahi. Ini merupakan permasalahan bangsa yang harus dipikirkan bersama untuk menemukan formula terbaik**

dalam mengatasinya agar tidak meluas ke daerah lain" kata Gubernur. Semua komponen bangsa berperan besar dalam meningkatkan rasa kebersamaan yang solid, dilandasi oleh nilai-nilai kebangsaan yang menjadi penting sebagai kekuatan nasional. Dari kegiatan pemantapan tersebut, Gubernur menyampaikan harapannya pada peserta, agar mampu: **pertama**, berpikir secara sistemik, komprehensif, dan integral untuk kepentingan nasional dalam kerangka NKRI; **kedua**, menumbuhkan sikap antisipatif, kooperatif, serta sinergis terhadap kepentingan rakyat; **ketiga**, peduli terhadap potensi yang dimiliki daerah dan mengembangkan kemandirian daerah, serta komitmen terhadap kelangsungan pembangunan nasional yang menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kesejahteraan rakyat.

Courtesy Call Atase Pertahanan A.S Lama dan Perkenalan Atase Pertahanan A.S Baru kepada Gubernur Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Muladi, S.H. pada 5 Juli 2010 menerima *Courtesy Call* Atase Pertahanan Amerika untuk Indonesia Colonel U.S. Army Kevin Richard, sekaligus menerima perkenalan Atase Pertahanan yang Baru Colonel U.S. Russel bertempat di Ruang Kerja Gubernur. Pada *Courtesy Call* dan Perkenalan tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Wakil Gubernur Marsdya TNI Dr. Rio Mendung Thalieb, Sekretaris Dewan Pengarah Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang, Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Kusworo, dan Kepala Biro Kerma

Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Endang Hairudin.

Courtesy Call tersebut adalah dalam rangka pamitan, sehubungan Colonel U.S. Army Kevin Richard akan mengakhiri tugasnya sebagai Atase Pertahanan untuk Indonesia pada tanggal 9 Juli 2010. Colonel U.S. Army Kevin selanjutnya akan menjabat sebagai Direktur Pengkajian *Asia Army Vorcalles* yang berkedudukan di Pennsylvania A.S. Sebagai penggantinya adalah Colonel U.S. Army Russel Balley yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Penasehat Keamanan Nasional

Presiden A.S. *Courtesy Call* dan perkenalan Atase Pertahanan AS yang baru tersebut di akhiri dengan tukar menukar cinderamata.

Pada kesempatan tersebut kepada pejabat lama, Gubernur Lemhannas RI mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas kerjasama yang baik selama bertugas di Indonesia dan kepada Atase Pertahanan yang baru Gubernur Lemhannas RI berharap agar di masa yang akan datang dapat lebih meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi, khususnya di bidang ketahanan nasional.



Suasana *courtesy call* Atase Pertahanan Amerika untuk Indonesia Colonel U.S. Army Kevin Richard, sekaligus perkenalan Atase Pertahanan yang Baru Colonel U.S. Army Russel Balley kepada Gubernur Lemhannas RI bertempat di Ruang Kerja Gubernur.

Kunjungan Gubernur Lemhannas RI ke Inggris dalam rangka SSLN PPRA XLIV tanggal 23 s/d 28 Juni 2010

Gubernur Lemhannas RI selaku Pimpinan Rombongan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) di dampingi oleh Sekretaris Dewan Pengarah Lemhannas RI, Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang dan Sekretaris Utama Lemhannas RI Dr. Ardi Partadinata, dalam ceramahnya yang berlangsung ± 1 (satu) jam, dihadiri antara lain oleh staf Kementerian Luar Negeri Inggris, *London School of Economi and Political Science* (LSE), para anggota perwakilan Kedutaan Besar RI di London Inggris, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 25 (duapuluh lima) orang peserta SSLN PPRA XLIV serta 7 (tujuh) orang pejabat Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI mengatakan bahwa Konsep Ketahanan Nasional yang dikembangkan Indonesia, saat ini telah diadopsi ASEAN. Hal tersebut terkait dengan semakin pentingnya peranan Lemhannas RI dalam mendorong Ketahanan Regional ASEAN, sehingga saat ini Konsep National Resilience sedang dalam proses pengembangan menuju Regional Resilience melalui *ASEAN Social Political Community*.

Selanjutnya Gubernur Lemhannas RI menyampaikan tentang pengalaman Indonesia dalam membangun Ketahanan Nasional. Bahwa Ketahanan Nasional Indonesia dibangun melalui berbagai aspek Ketahanan Nasional yang dimiliki, seperti Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan Alam, termasuk aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Kesemuanya itu mengacu pada Konsep *Comprehensive Security* yang di dalamnya terdapat *State*



Kepala Bidang Politik Kedutaan Besar RI saat memberikan ucapan selamat datang kepada Gubernur Lemhannas RI beserta Rombongan peserta SSLN

Security dan *Human Security*. Untuk itu Konsep Ketahanan Nasional Indonesia dilaksanakan dengan pendekatan yang menyeluruh, komprehensif, terintegrasi dan kohesif.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Ketahanan Nasional Indonesia lebih bersifat *defensive*, *less militaristic*, dan *inward looking*. Secara sederhana Ketahanan Nasional dapat diterjemahkan sebagai kemampuan untuk pulih dari kondisi yang tidak terduga; Memiliki kemampuan *engineering resilience*, yaitu kemampuan negara untuk dapat keluar dari krisis, sehingga dapat kembali kepada situasi yang normal; *Ecological Resilience*, yaitu kemampuan negara untuk mengadopsi dan mengadaptasi perubahan yang positif dari pembangunan; *Anticipatory*

Resilience, yaitu kemampuan dalam merasionalisasikan, memprediksi, dan mengantisipasi berbagai tantangan dan perubahan pada masa yang akan datang.

Pada sesi Tanya-Jawab, cakupan materinya sekitar Konsep Ketahanan Nasional Indonesia; Masa Depan Integrasi ASEAN dalam Menyikapi Isu Kawasan, Isu HAM, *Low Carbon Economy* (*Climate Change*), dan Ancaman terhadap Ketahanan Nasional Indonesia.

Kegiatan SSLN tersebut, selain diisi dengan Ceramah Gubernur di Chatham House, juga melakukan beberapa kunjungan ke beberapa Lembaga dan Kementerian Inggris, seperti Departemen Pertahanan, Kementerian Luar negeri, dan beberapa Industri Strategis di Inggris.

PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN, BAGI KALANGAN PEMUDA ANGKATAN II TAHUN 2010

Sebagai bangsa Indonesia yang berada di tengah percaturan politik dan ekonomi dunia yang serba terbuka, yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan makna kemerdekaan yaitu dapat berdaulat dan merdeka secara politik, mampu mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya, dengan tetap rasional dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Dalam hal ini pemuda harus lebih memupuk rasa cinta tanah airnya dan meningkatkan kemampuan sesuai dengan kapasitasnya, sehingga pemuda mampu mewujudkan cita-cita besar sumpah pemuda sesuai kompetensinya masing-masing.

Demikian Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi S.H., mengatakan pada Acara Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi kalangan Pemuda Angkatan II, hari senin tanggal 5 Juli 2010 di Lemhannas RI. Selanjutnya dalam sambutannya, "*menantang*" kepada generasi muda untuk dapat mengukir sejarah yang indah bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi atas dasar standar-standar atau indeks pergaulan antar bangsa serta diwarnai oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang pesat dan persaingan antar bangsa yang semakin tajam, yang akan sangat menentukan tingkat peradaban bangsa di masa depan.

Sebagai *agent of development*, pemuda bertugas untuk membangun bangsa di segala bidang, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Pemuda yang berperan *agent of modernization* bertugas dan bertindak sebagai



Gubernur Lemhannas mengalungkan tanda peserta kepada salah satu perwakilan peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Kalangan Pemuda Angkatan II

pelopor dan inovator. Jiwa kepeloporan dan inovator harus dimiliki kaum muda dan mengurangi ketergantungan pada orang lain. Bahkan para pemuda dituntut menjadi perintis dalam menciptakan lapangan kerja, bukan pencari kerja, kerja keras dan tidak mudah putus asa. Kepeloporan dan inovasi pemuda itulah yang harus segera dimulai. Disisi lain pemerintah harus berupaya menciptakan iklim usaha dan industri nasional yang kompetitif. Pemerintah harus mempunyai blue print pengembangan industri agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mendukung pelaku ekonomi.

Di samping itu, pemuda diharapkan tetap terus menempa dirinya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki kesetiakawanan sosial serta semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara yang tinggi. Pemuda sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan dan pembangunan bangsa, diharapkan mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan Konsensus Dasar Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, bentuk Negara Kesatuan RI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Gubernur Lemhannas RI menginginkan pemuda menjadi pelopor dalam mengeleminasi pengaruh-pengaruh negatif seperti anarkisme, kekerasan, terorisme, radikalisme, separatisme yang masih nampak di beberapa wilayah NKRI. Walaupun gerakan dimaksud kapasitasnya semakin menyempit namun tetap harus diwaspadai karena akan membawa pengaruh terhadap kualitas ketahanan



Peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi kalangan Pemuda Angkatan II

nasional bangsa.

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana mampu mempertahankan integritas teritorial, kedaulatan dan kemerdekaan politik dan keamanan nasional ditengah ancaman dari berbagai kepentingan internal maupun eksternal. Dalam hal ini peranan semua komponen bangsa khususnya generasi muda sebagai “*role model*” untuk selalu meningkatkan rasa kebersamaan yang solid dilandasi oleh nilai-nilai kebangsaan sebagai kekuatan nasional dan profesionalisme.

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dan landasan konsolidasi demokrasi pada hakekatnya tidak dapat diserahkan pada proses alamiah yang penuh turbulensi, namun harus merupakan upaya sistematis dan dialogis bagi para peserta dengan materi-materi yang menjadi bahan ajaran inti (*core*) Lemhannas RI yang harus dipahami oleh setiap peserta, sehingga para peserta akan mampu: **pertama**, berfikir secara sistemik dan komprehensif integral untuk kepentingan nasional dalam kerangka NKRI;

kedua, menumbuhkan sikap antisipatif, kooperatif, sinergik terhadap kepentingan rakyat; **ketiga**, mampu menggali potensi diri sehingga menjadi pemuda yang tangguh, berdaya juang tinggi, peduli terhadap permasalahan bangsa dan berkontribusi dalam segala aspek kehidupan; **keempat**, peduli terhadap potensi yang dimiliki daerah dan menumbuhkembangkan kemandirian daerah serta komitmen terhadap kelangsungan pembangunan nasional yang menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kesejahteraan rakyat.

Di akhir sambutannya Gubernur Lemhannas RI berharap kepada seluruh peserta kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Kalangan Pemuda agar dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti setiap kegiatan yang singkat ini, yakni dengan lebih cermat melihat substansi materi sesuai dengan alokasi waktu yang telah diberikan, sehingga tahapan demi tahapan kegiatan dapat bermanfaat secara optimal dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kedudukan para peserta di tengah-tengah masyarakat.

PERESMIAN REVITALISASI FITNESS CENTRE DI LEMHANNAS RI

Pada tanggal 18 Juni 2010 pukul 08.00 WIB, Gubernur Lemhannas RI melakukan peresmian revitalisasi pusat kebugaran (*fitness centre*) di Lt. dasar Gd. Widyaiswara Lemhannas RI. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Dewan Pengarah, Sekretaris Utama, Para Deputi, Para Pejabat Struktural, Para Tajar, Taji dan Taprof serta Para Perwakilan dari peserta PPRA XLIV dan XLV Lemhannas RI. Acara peresmian ini menandai bertambahnya berbagai sarana pembinaan fisik bagi segenap warga Lemhannas dan para peserta program pendidikan PPRA maupun PPSA.

Pembinaan fisik bagi segenap warga Lemhannas dan para peserta program pendidikan, adalah sangat penting karena kegiatan tersebut dilakukan untuk memelihara kesehatan dan kesempataan jasmani yang bermanfaat dalam membantu pelaksanaan tugas dan proses pendidikan di Lemhannas RI. Untuk itu Lemhannas RI merasa perlu menambah sarana olahraga seperti 4 (empat) unit *automatic treadmill*, serta penambahan 2 (dua) unit sepeda *sport*, 1 (satu) unit timbangan badan elektrik, 2 (dua) unit alat pelangsing badan dan 2 (dua) unit penghancur lemak, serta 4 (empat) buah TV 32 inchi, *sound system*, dan fasilitas lainnya. 1 (satu) unit *treadmill* merupakan sumbangan dari peserta PPRA XLIV.

Pengadaan prasarana olahraga tersebut menggunakan dana APBN tahun anggaran 2010. Oleh karena itu, diharapkan dapat selalu dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya, sehingga akan memiliki daya guna dan usia guna yang panjang.



Penandatanganan prasasti peresmian penggunaan fitness centre di Lt. dasar Gd. Widyaiswara Lemhannas RI

Akhirnya, Gubernur Lemhannas RI menghimbau kepada segenap warga Lemhannas RI dan peserta program pendidikan agar memanfaatkan sarana olahraga ini untuk kebugaran dan kesehatan jasmani yang memang diperlukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, dan kepada pengelola agar profesional dan juga dapat mengelola dan merawat sarana dan prasarana *fitness centre* dengan baik, karenanya setiap warga Lemhannas harus memiliki *sense of belonging* terhadap *fitness centre* tersebut.

PERINGATAN ISRA' DAN MI'RAJ DI LEMHANNAS RI

Pada tanggal 8 Juli 2010 Lemhannas RI menyelenggarakan Peringatan Isra' Mi'raj bertempat di Gedung Dwiwarna Purwa Lemhannas RI dengan tema **“Dengan Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan Integritas dan Profesionalisme”**, dan sebagai penceramah adalah KH. DR. Wijayanto. Acara peringatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb, hadir pada acara tersebut Sekretaris Utama Lemhannas RI, Para Deputi, Tenaga Ahli Pengajar, Pengkaji, Profesional, serta segenap warga Lemhannas RI.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI, menyatakan bahwa peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW tersebut untuk menyegarkan kembali keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan merenungkan kembali peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang intinya adalah menerima perintah menjalankan ibadah shalat 5 (lima) waktu dalam



Segecap warga Lemhannas RI yang turut hadir pada acara Peringatan Isra' Mi'raj

sehari semalam, yang merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim, sebagai wahana komunikasi langsung dengan Allah SWT.

Peringatan Isra' Mi'raj tersebut memiliki arti yang penting, terutama sekali saat Lemhannas RI sedang melaksanakan reformasi birokrasi yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas tinggi dan profesional, karena pada dasarnya reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, dan merupakan langkah strategis dalam membangun aparatur negara, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban amanat sesuai tugas dan fungsi.

KH. DR. Wijayanto di awal ceramahnya menyampaikan Hadist Rasulullah yang menyangkut dengan Isra' Mi'raj bahwa *“Orang hidup senantiasa harus mengingat Agama, dan mengingat Tuhan, sedangkan orang yang tidak mengingat Agama, tidak mengingat Tuhan seperti orang mati”* sehingga setiap orang yang ada di dunia terutama di Indonesia wajib hukumnya mengakui adanya Tuhan. Di jelaskan pula bahwa Isra' Mi'raj



KH. DR. Wijayanto saat memberikan ceramah dalam acara peringatan Isra' Mi'raj di Lemhannas RI

terkait erat dengan hubungan yang disebut dengan **Hablumminallah** (hubungan manusia dengan Tuhan) dan **Hablumminannas** (hubungan dengan sesama manusia) harus terpelihara dengan baik, sehingga akan timbul Mi'raj (*God Spot*) di semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Dengan demikian kita bisa mengeliminasi sifat takabur, menghidupkan nurani, memiliki ketenangan bathin, rasa berkecukupan, terhindar dari bahaya, *spirit* menuju *action positive, protection* terhadap *action negative*, dan meyakini kerja sebagai ibadah yang ikhlas.

Dapat disimpulkan bahwa inti dari peringatan Isra' Mi'raj tersebut, adalah umat manusia harus senantiasa ingat kepada Tuhan agar **Hablumminallah** dan **Hablumminannas** dapat terpelihara sehingga kehidupan dunia dan akhirat dapat terintegrasi dengan baik dan seimbang serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengarah : DR. Ardi Partadinata, M.H., M.Si.

Penanggung Jawab : Brigjen TNI Kusworo, **Redaktur :** Kolonel Ckm (K) Dr. Zawiah Ramlie, M.H., M.Sc.

Penyunting/Editor : Kolonel Caj. M. Sochib SM., Letkol Adm. Drs. M. Syahril, M.M., Mayor Inf. Risnal S.H., M.A.

Redaktur Pelaksana : Linda Purnamasari, Endah Heliana, S.Sos., Trias Noverdi, S.S.

Desain Grafis & Fotografer : Arief Musadayan, Arianto, Bambang Iman Aryanto

Sekretariat : Syafrizal, Gatot

Alamat Redaksi : Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jak-Pus (10110)

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>